

**LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT MANDIRI**



**PENGUATAN PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI  
(ASN, KEPALA DESA BESERTA PERANGKAT DESA)  
DI KECAMATAN KABILA DAN KECAMATAN BULANGO TIMUR**

**OLEH**

**Ketua Tim**

**ASMUN W. WANTU, S.Pd, M.Sc**

**NIP. 197807122005012004**

**Anggota 1**

**Dr. RAMLI MAHMUD, S.Pd.,M.A**

**NIP. 198205032015041002**

**Anggota 2**

**Dr. RASID YUNUS, S.Pd, M.Pd**

**NIP. 198402242008121003**

**JURUSAN ILMU HUKUM DAN KEMASYARAKATAN  
PROGRAM STUDI PPKn  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2024**

SISTEM INFORMASI PENGABDIAN  
**HALAMAN PENGESAHAN  
 PENGABDIAN MANDIRI 2024**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Judul Kegiatan                    | : Penguatan Perilaku Rasional Politik Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango |
| 2. Lokasi                            | : Kabupaten Bone Bolango   |
| 3. Ketua Tim Pelaksana               |  |
| a. Nama                              | : Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc  |
| b. NIP                               | : 197807122005012004   |
| c. Jabatan/Golongan                  | : Lektor / 3 c   |
| d. Program Studi/Jurusan             | : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  |
| e. Bidang Keahlian                   | :  |
| f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail    | : 081328615360 / asmun.wantu@ung.ac.id   |
| g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail     | : -  |
| 4. Anggota Tim Pelaksana             |  |
| a. Jumlah Anggota                    | : 2 orang  |
| b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian  | : Dr. Ramil Mahmud, S.Pd., MA /  |
| c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian | : Dr. Rasid Yunus, S.Pd., M.Pd / Pendidikan  |
| d. Mahasiswa yang terlibat           | : -  |
| 5. Lembaga/Institusi Mitra           |  |
| a. Nama Lembaga / Mitra              | : BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO   |
| b. Penanggung Jawab                  | : -  |
| c. Alamat/Telp./Faks/Surel           | : -  |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra (km)     | : -  |
| e. Bidang Kerja/Usaha                | : -  |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan          | : 6 bulan  |
| 7. Sumber Dana                       | : Biaya Sendiri  |
| 8. Total Biaya                       | : Rp. 2.500.000,-  |



Gorontalo, 8 November 2024  
 Ketua

S

(Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc)  
 NIP. 197807122005012004

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN .....	iv
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Deskripsi Potensi Wilayah .....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya .....	3
1.3 Teknologi/Metode yang Digunakan .....	4
1.4 Profil Singkat Kelompok Mitra .....	4
BAB II.....	6
TARGET DAN LUARAN.....	6
BAB III .....	7
METODE PELAKSANAAN.....	7
3.1 Persiapan .....	7
3.2 Pelaksanaan .....	7
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	7
3.4 Kelayakan Perguruan Tinggi.....	8
BAB IV .....	9
JADWAL DAN BIAYA KEGIATAN .....	9
4.1 Anggaran Biaya.....	9
4.2 Jadwal Kegiatan.....	9
4.3 Tempat Kegiatan .....	9
BAB V.....	10
HASIL YANG TELAH DICAPAI .....	10
. BAB VI .....	15
BAB VIII.....	16
PENUTUP.....	16
7.1 .....	16
7.2 Saran .....	16
7.3 Ucapan Terima Kasih.....	17
Identitas Ketua TIM .....	18

## **RINGKASAN**

Kecenderungan tidak netralnya birokrasi dalam Pemilu arena diakibatkan dari pola perilaku politik birokrasi. Perilaku politik birokrasi dalam pendekatan sosiologis dan indentifikasi partai membuat birokrasi terpola pada segmentasi kelompok agama, suku, partai politik dan lain sebagainya. Kenetralan birokrasi dapat tercapai jika preferensi politik birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa) berdasarkan pada perilaku politik yang rasional. Pengabdian ini bertujuan 1) Identifikasi masalah kerawanan pelanggaran Pemilu yang terjadi disekitar lingkungan Birokrasi, 2) Membangun kesadaran birokrasi untuk tetap berihktiar atas jenis pelanggaran Pemilu. 3) Memberikan penguatan atas penerapan nilai perilaku politik rasional dalam mendukung netralitas birokrasi dalam Pemilu. 4) sebagai sarana pendidikan politik untuk penguatan preferensi politik birokrasi menjadi pemilih cerdas dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada Pemilu serentak tahun 2024. Melalui pengabdian ini, birokrasi dapat aktif secara massif dalam melakukan pengawasan partisipatis menjelang Pemilu serentak tahun 2024.

***Kata Kunci : Perilaku, Rasional, Netralitas, Birokrasi, Pemilu***

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Deskripsi Potensi Wilayah**

Momentum Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah selalu mengisahkan masalah yang hingga kini belum dapat teratasi adalah masalah netralitas Birokrasi yang tidak independent serta cenderung mendukung pasangan calon tertentu. Data laporan KASN 2017, 2018, 2019 dan 2020 tercatat sekitar 2.347 kasus menyangkut dengan keberpihakan birokrasi dalam Pemilu. Catatan Kompas 16 Maret 2021 dan Bpost 16 Desember 2021 mengisyaratkan bahwa perilaku ketidaknetralan birokrasi menjelang Pemilu 2024 akan semakin kompleks bila dibanding dengan Pemilu sebelumnya. Selain itu, data survey KASN 2021 Menyebutkan bahwa penyebab ketidaknetralan birokrasi terdiri dari ikatan persaudaraan 50,76 % serta motif karir 49,72%, selain itu sekitar 62,7% disebabkan oleh posisi kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Kondisi seperti ini berakibat pada perilaku politik ASN yang tidak konsisten atas ideal rasionalnya birokrasi untuk bebas dalam politik praktis. Kondisi tersebut menjadi keresahan bagi ASN dalam kontestasi politik lokal. Keresahan tersebut berpengaruh terhadap preferensi politik birokrasi di daerah, sekitar 51,16 % Aspirasi ASN agar hak politiknya dicabut sebagai pemilih. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Bawaslu RI tentang potensi kerawanan Pilkada serentak 2024 diantaranya adalah mobilisasi birokrasi. Konteks tipe ideal rasional tersirat dengan jelas melalui regulasi dan tata aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam pasal 29 UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yang melarang dengan tegas kepala desa terlibat dalam politik praktis

Diantara ketiga regulasi tersebut telah dinyatakan dengan tegas bahwa Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa beserta Perangkatnya dilarang keras melakukan politik praktis atau terlibat dengan hal-hal yang berhubungan dengan

politik. Namun tidak selamanya regulasi tersebut dapat membatasi ruang gerak birokrasi dalam setiap agenda demokrasi, masih terdapat sebagian birokrasi terlibat langsung dengan agenda demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Realitanya banyak pelanggaran oknum birokrat khususnya berkaitan dengan netralitas. Tidak netralnya birokrasi karena paksaan dari atasan, ekspektasi jabatan dari politisi atau partai yang didukung maupun ikatan emosional oknum birokrat terhadap partai atau politisi serta kelompok birokrasi sebagai target potensial yang selalu dimanfaatkan oleh partai maupun politisi. (Firnas, 2016)

Problem reformasi birokrasi sangatlah kompleks, berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk menata birokrasi, namun disisi lain terdapat ragam masalah menyelimuti birokrasi era-sekarang terutama menyangkut dengan independensi/netralitas serta perilaku birokrasi ketika diperhadapkan dengan agenda demokrasi melalui Pemilu. Apa yang dikemukakan oleh Beetham (1975) dalam (Thoha, 2014) tentang tiga elemen pokok konsep ideal Weber, diantaranya birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis, kekuatan independen dalam masyarakat dan birokrasi tidak mampu memisahkan perilaku kepentingan mereka dengan kelompok masyarakat yang menyebabkan birokrasi kehilangan fungsi.

Data kuantitatif tersebut di atas juga searah dengan berbagai temuan tentang netralitas ASN dalam Pemilu maupun Pilkada diantaranya (Mahmud, et al., 2022) mengemukakan bahwa perilaku birokrasi dalam Pemilu cenderung dalam pendekatan perilaku sosiologis dan identifikasi partai, faktor kepala daerah menjadi pertimbangan utama ASN dan perangkat desa dalam mendukung calon tertentu. Temuan Jahan (2006) dalam (Sarker, Sultana, & Prodhan, 2017) mensinyalir bahwa politisasi birokrasi bukan hanya terjadi pada tataran eksekutif namun terjadi dalam struktur birokrasi yang berada dalam jajaran eksekutif seperti kepolisian.

Hal yang sama dikemukakan oleh (Gehlbach & Simpser, 2015) bahwa perilaku kepatuhan birokrasi seringkali penting untuk kelangsungan hidup politik, namun memunculkan kepatuhan dalam lingkungan yang dilembagakan secara lemah mengharuskan pelaku politik meyakinkan agen bahwa kekuasaan mereka pada kekuasaan aman, dengan memanipulasi kekuasaan dapat mendorong seorang birokrat untuk bekerja atas nama penguasa. Hal menarik lainnya adalah temuan (Adi, Nurdin N, Saiyasopon, Mohamed, & Fathoni, 2021) mensinyalir bahwa dalam setiap

perodesasi Pemilu, birokrasi selalu dikultuskan dengan ketidaknetralannya hingga saat ini belum dapat terselesaikan Atas dasar inilah (Porter & Rogowski, 2018) mengemukakan bahwa bias atas partisan yang tidak netral dalam pemilu harus dicermati lebih lanjut untuk melihat mengapa kelompok partisan ASN berpihak kepada calon dan partai tertentu dalam setiap Pemilu.

Hasil penelitian (Mahmud, et al., 2021) menunjukkan bahwa Sebagian besar ASN di jajaran struktural dan fungsional khususnya guru menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, Diantara pertimbangan yang dimaksud antara lain, pekerjaan sebagai ASN, Kepatuhan terhadap kepala daerah, kekeluargaan dan afiliasi ASN dengan organisasi kemasyarakatan.hal yang sama dikemukakan oleh (Wahyudi, 2018) menyimpulkan bahwa perilaku ketidaknetralan birokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak pra kemerdekaan hingga decade sekarang ini. Temuan tersebut tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh (Siti, 2021) bahwa birokrasi Indonesia masih rentan terhadap intruksi politik kekuasaan untuk melanggengkan status quo dalam Pemilu maupun Pilkada. Menonjolnya keterlibatan birokrasi seiring dengan keikutsertaan petahana dalam pemilihan umum nasional dan daerah. ASN mengalami disorientasi dan budaya birokrasi yang masih mempertahankan nilai lama membuat birokrasi tidak efektif dalam mempertahankan profesionalisme dan kenetralan dalam Pemilu. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka, terdapat beberapa ulasan mendasar tentang dukungan potensi pelaksanaan pengabdian ini antara lain :

:

1. Adanya dukungan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terkait giat penguatan preferensi politik ASN, Kepala desa beserta perangkatnya untuk netral dalam Pemilu
2. Adanya dukungan ASN, Kepala Desa serta Camat dalam pelaksanaan pengabdian.
3. Adanya keinginan bagi semua stakeholder termasuk KPU dan Bawaslu dalam mendorong netralitas ASN, Kepala Desa beserta perangkat di Provinsi Gorontalo.

## **1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya**

Secara keseluruhan, netralitas ASN, Kepala Desa dan aparat desa adalah masalah krusial yang terjadi dalam setiap Pemilu. Urgenitas tidak netralnya

birokrasi dalam Pemilu diakibatkan dari perilaku politik birokrasi dalam merepresentasikan kepentingan politik mereka. Merujuk pada masalah tersebut maka, metode penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan pengabdian dengan tema Penguatan Perilaku Rasional Politik Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) Menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bulanngo Timur Kabupaten Bone Bolango”.

### 1.3 Teknologi/Metode yang Digunakan

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini mencakup :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berhubungan dengan perilaku rasional politik birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.
- b. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi penguatan perilaku rasional politik Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.

### 1.4 Profil Singkat Kelompok Mitra

Kelempok mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah Bawaslu kabupaten Bone Boilango, Panwascam Kecamatan Kabila dan Bulango Timur beserta pemerintah kecamatan dikedua wilayah dimaksud. Observasi awal dari kelompok mitra dalam memitigasi kerawanan Pemilu khususnya di kabupaten Bopane Bolango mengalami ancaman serius dari segi mobilisasi birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) dalam memenangkan pasangan calon tertentu. Atas kebutuhan tersebut, kelompok mitra dan PT dalam hal ini Jurusan IHK/PPKn sama berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang Penguatan Perailkau Rasional Politik Birokrasi ((ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa)) menjelang Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Bone Bolango yang bertempat di Kecamatan Kabila dan Bulango Timur.

### 1.5 Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
------------------	---------	--------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASN yang berdomisili di Kecamatan Kecamatan Kabila dan Bulango Timur</li> <li>- Kepala Desa beserta Perangkat Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan kelompok mitra terhadap pelaksanaan kegiatan sosialiasi</li> <li>- Terdapat kewenangan yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk lembaga perguruan tinggi dalam memberikan Pendidikan politik termasuk kelompok birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pengetahuan dan peran Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) tentang agenda netralitas politik dalam Pemilu</li> <li>b. Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) Siswa kurang menyadari perannya sebagai kelompok independent dalam Pemilu</li> <li>c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu khususnya netralitas birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa)</li> </ul>
--	--	---

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

Terdapat beberapa target dalam proses pelaksanaan pengabdian ini, antara lain :

1. Identifikasi masalah menyangkut dengan kerawanan pelanggaran Pemilu yang terjadi disekitar Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa).
2. Membangun kesadaran Birokrasi untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilu
3. Memberikan Penguatan Netralitas Politik Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) dalam Pemilu
4. Penguatan preferensi politik kepada Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) menjadi pemilih cerdas dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada Pemilu serentak tahun 2024

Berdasarkan pada target kegiatan tersebut di atas, luaran kegiatan ini mencakup

1. Laporan hasil pengabdian kepada pihak terkait
2. Jurnal Ilmiah
3. HKI

## BAB III

### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Persiapan

Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango
2. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan
3. Persiapan sarana spanduk dan materi penyuluhan/ sosialisasi
4. Pelaksanaan pengabdian
5. Laporan Pengabdian
6. Penebitan Jurnal dan HKI

#### 3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan seara tatap muka dengan aparatur birokrasi (ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa) di Kecamatan Kabila dengan Kecamatan Bulango Timur dengan pelaksana program maupun narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Materi	Narasumber	Tempat
1	Alternbatif penguatan Perilaku Rasional Politik Birokrasi (ASN), Kepala Desa beserta perangkat Desa	Dr. Ramli Mahmud, S.Pd, M.A	Aula Kantor Desa Talango.
2	Regulasi Teknis Terkait Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sofyan Djama, S.Pd	Aula Kantor Desa Talango.

#### 3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Rencana keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah Bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango berama lembaga *Ad Hoc* serta pihak Pemerintah Kecamatan untuk melakukan pendampingan secara berkala kepada ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa serta mengaktifkan dan mendorong birokrasi ditingkat kecamatan untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan sosialisasi dan penggunaan media sebagai sarana pengawasan Partisipatif menjelang Pemilu 2023.

### **3.4 Kelayakan Perguruan Tinggi**

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi tugas pokok bagi Lembaga Perguruan Tinggi, dimana pengabdian masyarakat adalah bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kaitannya dengan hal tersebut, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi. PPKn FIS UNG perlu melakukan kegiatan dimaksud karena berhubungan dengan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memenuhi tuntutan kurikulum diantaranya adalah mata kuliah Pemilu dan Sistem Kepartaian, Demokrasi dan HAM, Sistem Pemerintahan Daerah serta Sistem Politik Indonesia

## BAB IV

### JADWAL DAN BIAYA KEGIATAN

#### 4.1 Anggaran Biaya

Uraian Kegiatan		Vol	Satuan	Harga	Jumlah
1	<b>Honorarium</b>	1	Org	500.00 0	500.000
2	<b>Bahan Habis Pakai</b>				
	Spanduk	1	Buah	200.00 0	200.000
	Kertas HVS A4 70 Gram	1	Rim	35.000	35.000
	Konsumsi Berat	30	Org	25.000	750.000
	Konsumsi Ringan	30	Org	10.000	300.000
3	<b>Perjalanan</b>				
	Survei Awal	2	Org	50.000	100.000
	Pelaksanaan Kegiatan	4	Org	50.000	200.000
4	<b>Lain-Lain</b>				
	Penyusunan, Penggandaan dab Penjilidan	3	Eks	15.000	15.000
	Penerbutan Jurnal	1	Jurnal	400.00 0	400.000
<b>Jumlah</b>					2.500.00 0

**Terbilang :**

*(Dua Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah)*

#### 4.2 Jadwal Kegiatan

1	JENIS KEGIATAN	BULAN					
		Agustus		September		Oktober	
		Minggu		Minggu		Minggu	
		III	IV	I	III	I	II
2	Persiapan						
3	Koordinasi						
3	Penulisan dan Pengajuan Proposal						
4	Pelaksanaan						
5	Laporan						
6	Jurnal						

#### 4.3 Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Aula Kantor Desa Tilango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

## BAB V

### HASIL YANG TELAH DICAPAI



Dasar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Penguatan Perilaku Rasional Politik Birokreasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa) di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bulango Utara menjelang Pemilu serentak Tahun 2024 adalah surat perjanjian kerjasama (LOA) Fakultas Ilmu Sosial dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango No. 3450/UN47.B2/HK07/2023) dengan Impelmentasi Kerjasama (IA) antara Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK)

Prodi. PPKn dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango No..... Kegiatan tersebut juga menjadi kebutuhan bagi aparatur birokrasi untuk menyeimbangkan informasi mengenai keberadaan mereka dalam Pemilu yang selama ini cenderung tidak netral.

Sejatinya aparatur birokrasi harusnya netral dalam Pemilu, akan tetapi pada kenyataannya aparatur birokrasi selalu dijadikan sebagai mesin pendulang suara disetiap hajatan Pemilu. Oleh sebab itu, pendekatan melalui berbagai perspektif perlu dilakukan agar permasalahan birokrasi dalam Pemilu dapat teratasi. Data (Kompas, 2021) dan laporan dan (KASN, 2024) menunjukkan terdapat 2.341 pelanggaran ASN dan aparatur desa sejak Pemilu 2017-2024. Temuan tersebut merupakan bagian dari data kuantitatif yang tidak dapat dibantah, namun demikian jika dilihat secara ditel dalam prakteknya, data kualitatif menunjukkan bahwa hampir Sebagian besar aparatur birokrasi cenderung tidak netral. Atas hal tersebut, perlu adanya penguatan pada aspek perilaku politik rasional birokrasi agar ASN maupun perangkat desa dapat mengedepankan perilaku rasionalnya dalam Pemilu.

Efektifnya pelaksanaan pengabdian tersebut juga sangat tergantung dengan ketepatan metode untuk mendiagnosa permasalahan melalui metode sosialisasi dan

penyebaran angket melalui *google form* yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan. Hal ini dilakukan agar muatan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh peserta pengabdian. Hasil temuan data menunjukkan bahwa sebagian besar preferensi politik peserta lebih condong pada perilaku sosiologis dan psikologis/ identifikasi partai.

Diantaranya, preferensi sosiologis berdasarkan pertimbangan ketokohan, agama, kekerabatan, Bahasa dan lain sebagai sebanyak 73



%. Sementara itu perilaku psikologis dengan pertimbangan partai politik 19 % dan rasional dengan pertimbangan kebutuhan dan keuntungan sebanyak 8 %. Kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa kecenderungan aparatur birokrasi sulit untuk dicapai jika perilaku politik birokrasi lebih cenderung pada pendekatan sosiologis dan psikologis.

Kondisi yang terjadi di kecamatan Kabila maupun Bulango Utara tersebut juga sesuai dengan temuan (Mahmud, et al., 2021) dan bahwa secara umum perilaku aparatur birokrasi baik aparatur birokrasi yang berada dalam jajaran



fungsional dan struktural lebih mengedepankan pendekatan sosiologis sehingga membuat birokrasi cenderung tidak netral. Begitupun sebaliknya temuan (Mahmud, et al., 2022) mengemukakan bahwa terdapat

kecenderungan aparatur birokrasi di jajaran fungsional Kesehatan lebih rasional dan cenderung netral dalam Pemilu 2019 bila dibandingkan dengan aparatur birokrasi yang berada dalam jajaran structural dan fungsional guru cenderung tidak netral karena lebih mengedepankan pertimbangan atau pendekatan sosiologis dan psikologis.

Atas hal tersebut, materi sosialisasi dalam kegiatan pengabdian lebih fokus pada pendekatan rasional bila dibandingkan dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Terdapat berbagai respon berragam dari peserta dalam agenda diskusi, namun pada prisnipnya peserta merasakan bahwa informasi dengan tema penguatan perilaku rasional aparatur birokrasi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta dalam mengedepankan perilaku rasional memberikan pilihan politik pada Pemilu 2024. Peserta juga menyadari bahwa sikap selama dalam Pemilu selalu didikte oleh atasan dan lain sebagainya. Melalui materi yang telah disajikan dapat memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi atas keberadaannya sebagai abdi negara untuk netral dalam pemilu dan bersikap rasional dalam arena Pemilu.



Selain itu, materi teknis Bawaslu Kabupaten Bone Bolango tentang pelanggaran ASN dan aparat desa dalam Pemilu juga dapat memberikan penguatan kepada peserta tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan larangan aktifitas ASN

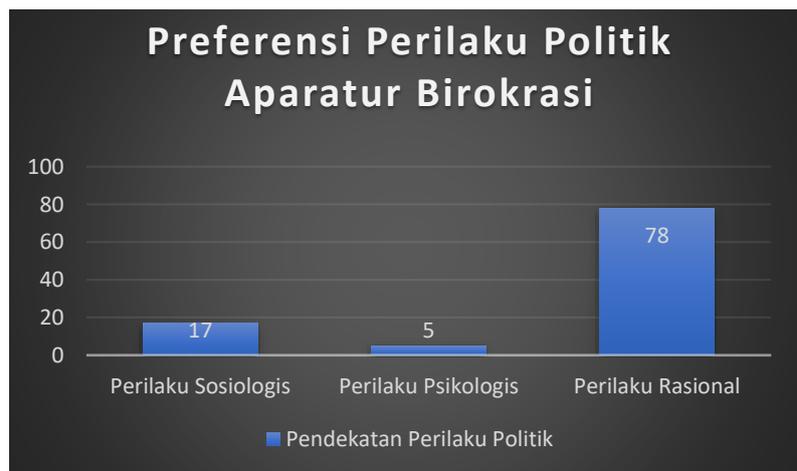


dan aparat desa dalam Pemilu serentak. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa terkait kebijakan program layanan dasar

kepada warga Masyarakat. Hampir sebagian besar kepala desa merasa bingung denga apa yang mereka hadapi. Disatu sisi terdapat larangan aktifitas kepala desa dalam kegiatan yang menguntuk pasangan calon, dilain sisi kepala desa juga harus menjalankan kebijakan bupati. Untuk mengsingkronisasi msalah tersebut, penguatan terhadap perilaku rasional politik dapat membantu para kepala desa

dalam menelaah dan mengeksekusi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat tanpa merugikan salah satu pasangan calon.

Kegiatan pengabdian berjalan efektif sesuai dengan skema yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan Jutrusan IHK Prodi PPKn FIS UNG. Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan manfaat pelaksanaan pengabdian. Salah satu indikatornya adalah hasil sebaran kuesioner yang diedarkan setelah pelaksanaan kegiatan melalui *google form* seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Hasil olahan data setelah pelaksanaan pengabdian menunjukkan bahwa terdapat penguatan preferensi perilaku politik bagi aparatur birokrasi. Ditaman terdapat 78 % perilaku rasional politik yang terdiri dari aspek pertimbangan kebutuhan 30 % dan visi misi sebanyak 48 %.

Hal ini berbeda dengan temuan data seblum pelaksanaan pengabdian dimana sekitar 8 % peserta cenderung rasional. Begitu juga sebaliknya, 73 % perilaku sosiologis sebelum kegiatan dan setelah kegiatan menjadi 17 % yang terdiri dari aspek pertimbangan ketokohan 10 % dan kekerabatan 7 % serta masih terdapat 5 % peserta cenderung mendukung dan memilih pasangan calon karena pertimbangan psikologis atau partai politik. Berangkat dari temuan hasil pengabdian tersebut dapat digarisbawahi bahwa penguatan perilaku rasional politik aparatur birokrasi dapat mendorong netralitasnya dalam Pemilu. Dilain sisi, pertimbangan politik berdasarkan pendekatan atau perilaku sosiologis dan psikologis cenderung membuat birokrasi tidak netral dalam Pemilu. Kondisi ini terjadi dikarenakan pertimbangan ketokohan, kekerabatan dan identifikasi partai akan cenderung memihak, hal ini berbeda dengan perilaku rasional yang lebih

mengedepankan perhitungan untung rugi berdasarkan kebutuhan dan visi misi pasangan calon.

**. BAB VI**  
**RENCANA TAHAP SELANJUTNYA**

Berdasarkan pada pencapaian dari hasil pengabdian diatas maka rekomendasi untuk rencana tahap selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengabdian berkelanjutan Kerjasama antara Jurusan IHK Prodi PPKn dengan penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU Kabupaten Bone Bolango terkait netralitas aparatur birokrasi.
- b. Hasil pengabdian ini akan dijurnalkan ke jurnal nasional yang bereputasi agar bisa menjadi rujukan bagi setiap orang yang yang melakukan pengabdian tentang netralitas birokrasi dalam Pemilu.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **7.1**

Penguatan Perilaku Rasional Politik dapat dijadikan sebagai alternatif bagi aparatur birokrasi untuk menjaga netralitasnya pada saat Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terdapat capaian atas tujuan dan manfaat pengabdian. Preferensi politik aparatur birokrasi dalam pendekatan perilaku sosiologis dari aspek ketolohan dan kekerabatan serta perilaku psikologis dengan pertimbangan partai politik cenderung membuat aparatur birokrasi tidak netral dalam Pemilu. Sikap dan perilaku politik dengan mengedepankan ketokohan, kekerabatan serta partai politik akan mempengaruhi dukungan dan Keputusan politik untuk memilih pasangan calon. Akibatnya akan terjadi polarisasi dukungan dan aparatur birokrasi akan berpihak dalam mendukung maupun memobilisasi pemilih dalam Pemilu. Kecenderungan netralitas aparatur birokrasi dalam Pemilu dapat terjadi jika perilaku rasional politik menjadi acuan dalam Pemilu. Hitungan untung dan rugi dalam memberikan hak politik berdasarkan kebutuhan dan visi-misi pasangan calon akan mampu mendorong aparatur birokrasi untuk keluar dari tekanan politik serta mandiri dalam pilihan politik tanpa intervensi.

#### **7.2 Saran**

Atas temuan pengabdian dan Kesimpulan di atas, saran atau rekomendasi sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pembinaan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun instansi pemerintah daerah terkait perilaku rasional politik baik aparatur birokrasi (ASN dan aparat desa) dilingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- b. Kerjasama berkelanjutan antara Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK) Prodi. PPKn UNG dengan lembaga penyelenggara Pemilu Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo terkait isu-isu Kepemiluan.

### **7.3 Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango beserta staf dan jajaran, LP2M Universitas Negeri Gorontalo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Pemerintah Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bulango Timur atas dukungan dalam pelaksanaan Pengabdian.

## Identitas Ketua TIM

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	<b>Asmun W Wantu, S.Pd.,M.Sc</b>
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya	197807122005012004
5	NIDN	001207803
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Limehe Barat 12 Juli 1978
7	E-mail	
8	Nomor Telepon / HP	(0435) 834829 /081328615360
9	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon / Fax	0435 827038, Fax 0435 827038
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 70 Orang, S2=.... Orang, S3=... Orang
12. Mata Kuliah Yang Diampu		1. Belajar Dan Pembelajaran
		2. Pendidikan Kewarganegaraan
		3. Ilmu Kewarganegaraan
		4. Kurikulum Dan Buku Teks PPkn
		5. Perkembangan Peserta Didik

### A. Riwayat Pendidikan

	<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>
Nama Perguruan Tinggi	*Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Gadjah Mada	
Bidang Ilmu	*Pendidikan Kewarganegaraan	Ketahanan Nasional	
Tahun Masuk – Lulus			
Judul Skripsi/Te- sis/Disert asi	*Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui metode Diskusi	Interaksi Sosial Antara Etnis Pendatang Dan Etnis Lokal Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Studi Di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.	
Nama Pembimbing/Promotor	1. Drs. Revoltje O.W Kaunang MPd 2. Fenty Puluhulawa, SH M.Hum	1.Prof Dr Kodiran 2. Dr Ahmad Zubaidi MSc	

### C. PENGALAMAN PELATIHAN/SEMINAR

No.	JUDUL KEGIATAN	TAHUN	PENYELENGARA
1.	Saresehan Nasional	2011	Mahkamah Konstitusi
2.	Dialog Budaya	2011	Kementrian Kebudayaan dan Parawisata
3.	Peningkatan SDM dalam mengembangkan Potensi Unggulan	2005	UNG
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan	2006	UNG
5.	Evaluasi Pelaksanaan KTSP	2006	UNG
6.	Sarasehan Nasional “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia”	2010	Jogjakarta
7.	Focus Group Discusion (FGD) “Konsepsi Pelebagaan perancangan dan advokasi hubungan pusat dan daerah menuju pembentukan pusat studi kebijakan dan informasi hukum pusat daerah di Provinsi Gorontalo”	2011	Gorontalo
8	Dialog budaya “membangun generasi terbaik dan peradaban nilai menuju daya saing bangsa	2011	Manado
9	Seminar Nasional “Tranformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan	2012	UPI Bandung
10	Lokakarya Pengembangan akreditasi program studi Perguruan Tinggi di UNG	2012	Gorontalo
11	Seminar Nasional “Pencegahan Perilaku Kekerasan dalam Masyarakat Multikultural	2013	Gorontalo

12	Seminar Nasional BPK, pengelolaan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat	2015	Gorontalo
----	--	------	-----------

#### **D. PENGALAMAN PENELITIAN**

No.	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	SUMBER DANA/PENYELENGARA
1.	Upaya meningkatkan Aktivitas Belajar Peserta didik melalui metode diskusi (Penelitian Tindakan Kelas di MTs Negeri Batudaa)	2006	PNBP
2.	Implikasi dan Implementasi Otonomi Daerah Menuju Kemandirian wilayah di Propinsi Gorontalo	2007	PNBP
3.	Kebebasan Berpendapat dalam Konsep Wawasan Kebangsaan	2008	PNBP
4.	PILKADA dan Stabilitas Nasional	2009	PNBP
5.	Model Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Prospektif Kapasiti Building (Studi di Kab. Bone Bolango)	2011	PNBP
6	Pemetaan Stabilitas Politik Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo	2018	APBD Kabupaten Boalemo

#### **E. Pengalaman menulis jurnal/artikel**

No.	JUDUL Artikel	TAHUN
1.	Implikasi dan Implementasi Otonomi Daerah Menuju Kemandirian wilayah di Propinsi Gorontalo	2007
2.	Kebebasan Berpendapat dalam Konsep Wawasan Kebangsaan	2008

3.	PILKADA dan Stabilitas Nasional	2009
4.	Interaksi Sosial Antara Etnis Pendatang Dan Etnis Lokal Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Studi Di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.	2010

#### F. Pengalaman Pengabdian Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jmlh (Juta Rp)
1	2015	Pemateri pada kegiatan dialog pendidikan “Menjadi pemuda atriotism”	Fakultas Ilmu Sosial	500.000
2	2015	Instruktur pada pelatihan pembinaan karakter “Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter mahasiswa yang berakhlak Qul-Karima”	Fakultas Ilmu Sosial	500.000
3	2014	Pembimbing PKL Mahasiswa Prodi PPKn	Program Studi PPKn	1.000.000
4	2014	Instruktur PLPG rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo	UNG	450.000
5	2013	Pembimbing PKL Mahasiswa Prodi PPKn	Program Studi PPKn	1.000.000
6	2013	Pembimbing KKS Mahasiswa Prodi PPKn	LPM-UNG	2.500.000
7	2018	Pendidikan Politik Milenial di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungalio Kabupaten Gorontalo	PNBP FIS UNG	5.000.000
8	2020	Pembinaan Generasi Muda Dalam Pembangunan Desa Di Desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara	Mandiri	5.000.000
9	2021	Pencegahan Pernikahan Dini, Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Mandiri	5.000.000

10.	2022	(Pengabdian Kolaboratif) Santri Bertanya Pemilu Menjawab	PNBP FIS	2.500.000
-----	------	--	----------	-----------

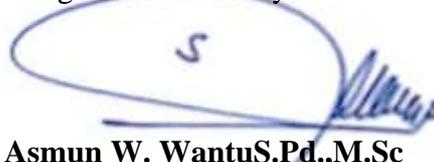
**G. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, Asosiasi atau Institusi**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Keterangan / Tahun
1	Pelatihan Keterampilan Instruksional Teknis (Pekerti) dan Applied Approach (AA)	Universitas Negeri Gorontalo	2010
2	Pelatihan pembelajaran aktif di perguruan tinggi (Active learning in Higher-Education-ALIHE)	Universitas Negeri Gorontalo	2010
3	Rapat kerja Asosiasi Profesi PPKn Indonesia	UPI Bandung	2012
4	Memperoleh sertifikat pendidik dosen profesional	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Asmun W. Wantu S.Pd., M.Sc**

NIP. 19780712 200501 2 004